

Pemkab Minta Jaminan Keamanan

● Pembangunan Pasar Ir Soekarno

SUKOHARJO - Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya minta jaminan atau garansi aman ketika proyek Pasar Ir Soekarno dilanjutkan saat ini.

"Saya ingin bertanya, adakah yang berani memberikan jaminan atau garansi keamanan tidak ada persoalan hukum ketika pasar dibangun saat ini," ujar Bupati Wardoyo Wijaya saat ditemui usai shalat Jumat di masjid kompleks DPRD Sukoharjo.

Dikatakan, tidak ada seorang pun, utamanya pejabat yang ingin masuk penjara. Karena itu, dalam kasus Pasar Ir Soekarno, Pemkab untuk saat ini tidak bisa berbuat banyak.

Sebab, secara normatif, pemerintah sudah dibatasi dengan aturan-aturan yang ada. Salah satunya adalah soal anggaran, sehingga eksekutif tidak bisa serta-merta mengeluarkan uang negara tanpa melalui prosedur yang benar.

Jika berbicara jujur, kata Bupati, bisa saja pemerintah melunasi pembayaran kepada PT Ampuh selaku pelaksana proyek. Setelah itu dilanjutkan dengan pembangunan kembali proyek.

"Tetapi persoalannya, kalau proses itu kami laksanakan tanpa aturan yang jelas, kami yang masuk penjara. Tetapi kalau memang ada yang bisa menjamin melakukan itu aman dan tidak tersangkut hukum, kami siap," tegasnya.

Pihaknya menyadari betul apa yang dirasakan oleh pedagang. Namun demikian, proses yang saat ini sedang berjalan tidak mungkin dilewatkan.

Sebab, ada aturan main yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Salah satunya adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

Karena itu, sekali lagi pihaknya tetap akan menunggu sampai BPK menyelesaikan audit.

Patokan

"Apa yang diperintahkan BPK dalam hasil audit itu nanti yang akan menjadi pijakan dan patokan. Misalnya, BPK memerintahkan Pemkab harus bayar ke PT Ampuh, langsung kami bayar."

Bupati sendiri menepis anggapan bahwa dia takut menemui pedagang saat demo, Kamis (16/1). Pihaknya tidak menemui pedagang karena memang ada rakor dengan Gubernur Jawa Tengah di Semarang.

Terkait dengan persoalan itu, Eko Raharjo dari Pusat Kajian Keuangan Daerah (PK2D) Sukoharjo mengatakan, secara normatif anggaran, posisi Pemkab memang seperti itu.

Hanya dalam kasus ini sebenarnya penegak hukum sudah bisa masuk tanpa harus menunggu hasil audit dari BPK. Artinya, penegak hukum, dalam hal ini Polres atau Kejari, bisa menelusuri bagaimana proses awal proyek.

"Hasil audit BPK itu nanti sebagai penegasan nilai kerugian negara dalam proyek. Tetapi sebenarnya aparat sudah bisa masuk untuk menelisik dari sisi mana yang bermasalah, apakah sejak awal sudah sesuai prosedur atau belum," ujar Eko Raharjo.

Kalau dikatakan anggaran proyek kurang, bagaimana dengan perencanaan sebelumnya. Begitu juga bagaimana dengan posisi pelaksana yang sudah melaksanakan kegiatan itu.

Dia mengibaratkan, seseorang membutuhkan rokok A yang harganya di pasaran Rp 12 ribu. Padahal, orang itu hanya punya Rp 10 ribu. Logikanya, ketika ada yang berani membelikan, itu sudah menjadi risiko yang membelikan. (H46-85,47)